



PERINGKAT KEMUDAHAN BERBISNIS INDONESIA

Suhartono*)

Abstrak

Upaya memperbaiki iklim kemudahan berbisnis menjadi fokus banyak negara termasuk Indonesia. Loncatan peringkat kemudahan berbisnis Indonesia untuk tahun 2017 memberikan harapan bagi peningkatan minat investor untuk berusaha di Indonesia di tengah kelesuan dan ketidakpastian ekonomi dunia. Namun, peringkat Indonesia masih jauh dibanding dengan negara tetangga dan dari target pemerintah sendiri. Untuk itu perlu kerja keras dalam membangun infrastruktur dan reformasi pelayanan publik yang mendukung perbaikan iklim usaha secara terus menerus. DPR dapat berperan memastikan kerangka regulasi dan prioritas anggaran mendukung upaya meningkatkan peringkat kemudahan berbisnis di Indonesia.

Pendahuluan

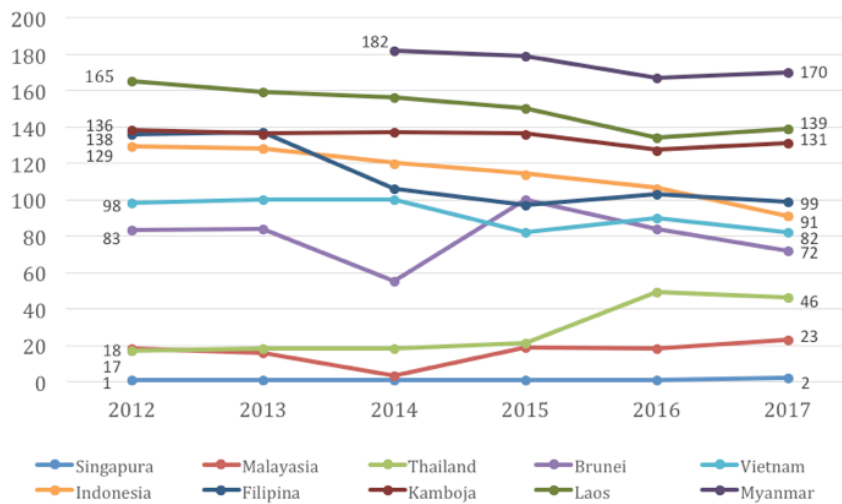
Peringkat kemudahan berbisnis di Indonesia diperkirakan akan meningkat cukup tajam dari peringkat 106 pada tahun 2016 menjadi 91 pada tahun 2017. Kenaikan 15 peringkat tersebut membuat Indonesia, menurut Bank Dunia, masuk ke dalam jajaran 10 negara yang mencapai peningkatan tertinggi dalam *Doing Business 2017: Equal Opportunity for All*. Peningkatan kemudahan berbisnis dilakukan oleh Bank Dunia setiap tahunnya dengan jumlah negara yang dinilai semakin bertambah dari tahun ke tahun, dari 183 negara pada tahun 2012, 185 negara tahun 2013, dan 189 negara pada tahun 2014 hingga 2016. Peningkatan peringkat kemudahan berbisnis memberikan gambaran seberapa menarik atau tingginya

daya saing suatu negara dalam menciptakan iklim usaha yang mendukung investor memulai usahanya. Peringkat yang tinggi tentunya memberikan keuntungan tersendiri bagi negara tersebut dalam menarik pelaku usaha dari berbagai negara untuk memulai bisnis di negara tersebut.

Iklim bisnis atau kemudahan usaha dalam konteks ASEAN, peringkat bisnis Indonesia masih jauh di bawah Singapura, Malaysia, Thailand, dan Vietnam (Gambar 1). Posisi ini memberikan gambaran bahwa Indonesia masih kalah dalam menciptakan iklim berusaha dibandingkan dengan beberapa negara tersebut. Oleh karena itu, tahun 2015 lalu, Presiden Jokowi telah menargetkan agar posisi Indonesia dalam indikator kemudahan berbisnis dapat naik

*) Peneliti Madya Kebijakan Publik pada Bidang Ekonomi dan Kebijakan Publik, Pusat Penelitian, Badan Keahlian DPR RI.
E-mail: suhartonot@yahoo.com





Sumber: Kompas, 15 November 2016 dan Doing Business World Bank.

Gambar 1. Perkembangan Peringkat Kemudahan Berbisnis Negara-Negara ASEAN Tahun 2012-2017

menjadi peringkat ke-40 agar mampu menggeser negara pesaing di regional ASEAN seperti Singapura yang berada di posisi pertama, Malaysia di peringkat 18, dan Thailand yang duduk di posisi 49.

Bisnis sudah menjadi mesin pertumbuhan ekonomi suatu negara. Sehingga banyak negara berusaha memperbaiki iklim atau lingkungan bisnis negaranya agar menarik banyak investasi dan pelaku usaha, baik pemilik modal dari dalam negeri maupun luar negeri. Di dalam setiap kegiatan bisnis, terkandung di dalamnya sejumlah faktor produksi baik modal, tenaga kerja, maupun bahan baku beserta produk dan layanannya. Setiap keluaran dari aktivitas bisnis akan menambah produktivitas nasional yang diukur dari *gross domestic product* (GDP). Dengan kata lain, apabila terjadi pertumbuhan kegiatan bisnis, dapat diartikan adanya juga pertumbuhan ekonomi. Perbaikan peringkat kemudahan berbisnis diharapkan mendukung realisasi target pertumbuhan ekonomi nasional yang diperkirakan oleh Bank Indonesia pada tahun 2016 cenderung mendekati batas bawah kisaran 4,9 sampai 5,3 persen secara tahunan, serta proyeksi pertumbuhan ekonomi di atas 5 persen pada tahun 2017.

Pentingnya peringkat kemudahan berbisnis bagi iklim investasi menjadi salah satu tantangan yang harus diselesaikan oleh setiap pemerintahan, terutama dalam mencari peluang-peluang menggerakkan ekonomi dalam negeri di tengah kelesuan ekonomi dunia. Efisiensi dan efektivitas

kerja pelayanan menentukan kelas suatu bangsa atau negara sebagai aktor perdagangan dan investasi di dunia internasional yang sering menghadapi perubahan dan ketidakpastian. Hanya negara yang mampu membangun keunggulan yang mampu beradaptasi ataupun memimpin perubahan itu sendiri. Tulisan ini akan membahas aspek-aspek yang mendukung terciptanya kemudahan berbisnis agar menjadi perhatian semua pemangku kepentingan, terutama penyelenggara layanan publik yang bersentuhan langsung dengan aktivitas bisnis.

Indikator- Indikator Kemudahan Berbisnis

Untuk meraih posisi terbaik dalam menciptakan iklim investasi, sebuah negara harus mampu mengelola sejumlah indikator yang membentuk lingkungan bisnis yang mengarah kepada *business friendly*. Bank Dunia menggunakan sepuluh indikator dalam melakukan penilaian terhadap kemudahan berbisnis di suatu negara. Kesepuluh indikator tersebut adalah memulai usaha, pendaftaran properti, perdagangan lintas negara, perlindungan terhadap investor minoritas, menyelesaikan perkara kepailitan, perizinan pendirian bangunan, penyambungan listrik, pembayaran pajak, akses perkreditan, dan penegakan kontrak.

Dari sepuluh indikator penilaian, dalam kurun waktu tiga tahun terakhir, pemerintah telah melakukan reformasi

di tujuh indikator, yaitu memulai usaha, kemudahan memperoleh sambungan listrik, pendaftaran properti, kemudahan memperoleh pinjaman, pembayaran pajak, perdagangan lintas batas, dan penegakan kontrak. Reformasi di tujuh indikator ini membuahkan hasil, salah satunya lama waktu penyambungan listrik terus meningkat dari 79 hari di tahun 2016 menjadi 58 hari pada proyeksi tahun 2017. Hal ini memperbaiki peringkat penyambungan listrik dari 61 menjadi ke 49. Kemajuan signifikan juga terjadi dari indikator memulai usaha dari sebelumnya 48 hari menjadi 25 hari, sehingga mampu memperbaiki peringkat dari 167 menjadi 151. Perbaikan pelayanan jasa keuangan dalam mendukung kegiatan bisnis berupa kemudahan terhadap akses kredit terus membaik dari sebelumnya peringkat 70 menjadi 62. Perbaikan pelayanan bea cukai dalam kegiatan ekspor impor juga menjadi salah satu yang memperbaiki peringkat perpajakan di Indonesia menurut Bank Dunia.

Kunci dari perbaikan peringkat ada pada keberhasilan pemerintah melakukan reformasi pelayanan publik dan perbaikan infrastruktur. Kemudahan memulai bisnis dan percepatan waktu pemasangan listrik merupakan hasil dari reformasi pelayanan publik dan pembangunan infrastruktur. Dalam konteks pelayanan publik, pebisnis merupakan *customer* dari pelayanan publik yang diberikan oleh pemerintah. Orientasi pelayanan publik mulai diubah dari publik melayani aparatur menjadi aparatur melayani publik. Program reformasi pelayanan publik bisa mengubah orientasi pelayanan dari yang lambat menjadi cepat, sulit menjadi mudah, dan tentunya infrastruktur yang terus dibangun mampu memenuhi ekspektasi dari pelaku usaha akan sumber energi yang vital bagi bekerjanya suatu industri.

Tiga indikator lainnya berupa perlindungan terhadap investor minoritas, menyelesaikan perkara kepailitan, perizinan pendirian bangunan yang belum tersentuh reformasi akan menjadi sasaran perbaikan tahun berikutnya. Menurut Darmin Nasution, tiga indikator tersebut bukan belum ditangani tetapi hanya terlambat diidentifikasi. Pemerintah yakin tiga indikator yang tersisa akan menampakkan

hasil yang signifikan terhadap posisi Indonesia dalam kemudahan berbisnis pada tahun depan.

Pemerataan Kemudahan Berbisnis

Kemudahan berbisnis menjadi daya tarik investasi. Persoalannya, kemudahan berbisnis yang terbaik dengan daya dukung infrastruktur dan sumber daya manusia masih berpusat di Pulau Jawa. Dalam pemeringkatan Bank Dunia, langkah reformasi perizinan, pemanfaatan teknologi daring, dan infrastruktur di Kota Jakarta dan Surabaya memberikan efek signifikan bagi perbaikan iklim kemudahan berbisnis secara nasional.

Kondisi tersebut seharusnya menjadi perhatian karena daya saing kota di pulau Jawa masih terlalu tinggi dibandingkan kota lain di luar Pulau Jawa. Konsentrasi keunggulan kemudahan berbisnis di Pulau Jawa akan menimbulkan persoalan ketimpangan atau pemerataan. Daerah-daerah di luar Pulau Jawa akan sulit menjadi pusat pertumbuhan ketika faktor infrastruktur, reformasi pelayanan publik, dan pemanfaatan teknologi tidak mendapat prioritas, di tengah keterbatasan anggaran akibat penurunan penerimaan negara dari pajak dan ekspor.

Kebutuhan infrastruktur dan perbaikan sejumlah faktor atau indikator kemudahan berbisnis di luar Pulau Jawa semakin mendesak. Namun, sejumlah kawasan industri di luar Pulau Jawa, baik yang sudah terbangun maupun yang baru disiapkan, mengalami persoalan infrastruktur, energi, keamanan, dan kenyamanan usaha. Menurut Sekjen Asosiasi Industri Olefin, Aromatik, dan Plastik Indonesia, pelaku industri akan memilih berinvestasi di luar Jawa apabila ada dukungan infrastruktur dan penurunan biaya logistik. Pandangan ini mewakili suara pelaku usaha dalam melihat daya tarik iklim usaha di luar Pulau Jawa.

Beberapa daerah mengalami kecenderungan deindustrialisasi akibat 10 indikator iklim usaha tidak kunjung mengalami perbaikan. Pelaku usaha di kawasan industri Medan, Sumatera Utara mempersoalkan keseriusan pemerintah dalam memperbaiki infrastruktur yang buruk seperti jalan yang rusak dan banjir menuju dan menghubungkan kawasan

industri dengan pelabuhan atau pusat ekonomi lainnya. Faktor keamanan dan kenyamanan akibat pengelolaan lingkungan sosial sekitar kawasan yang kurang diperhatikan mengurangi minat maupun menjadi faktor pelaku usaha memindahkan usahanya karena tidak efisien dan efektif. Pengelola kawasan industri Makassar melihat biaya produksi kegiatan usaha di luar Pulau Jawa masih relatif tinggi dibanding Pulau Jawa menjadi penyebab masih minimnya ketertarikan pelaku usaha berinvestasi di kawasan industri Makassar. Asosiasi Pengusaha Jawa Tengah melihat kawasan industri yang tidak efisien atau kalah dalam mengurangi biaya produksi sering mendorong pelaku usaha memulai usahanya di luar kawasan industri.

Walaupun model perbaikan iklim usaha melalui model kawasan industri masih dikritisi oleh para pelaku usaha, namun model kawasan industri diakui masih menjadi alternatif yang menguntungkan baik bagi pemerintah dan pelaku usaha. Model pengembangan kawasan industri mengefisienkan pembangunan infrastruktur, pelayanan publik, dan pengawasan pemerintah, karena semua industri berkumpul dalam satu wilayah. Bagi pelaku usaha sendiri, kawasan industri yang di dalamnya terdapat sejumlah industri yang memiliki keterikatan produksi dari hulu sampai hilir juga memberikan efisiensi dalam proses produksinya, dan pelayanan publik juga mudah diakses oleh pelaku usaha. Bagi pengelola usaha, daya saing atau lingkungan bisnis dari kawasan industri memerlukan dukungan pemerintah dan DPR, antara lain kepastian regulasi peruntukan kawasan dan dukungan dalam pembebasan lahan. Regulasi peruntukan kawasan akan memperbaiki perencanaan pengembangan kawasan dan mempromosikannya ke para investor.

Penutup

Loncatan peringkat kemudahan berbisnis Indonesia dalam proyeksi 2017 tentunya memberikan harapan bagi peningkatan minat investor berinvestasi di Indonesia di tengah kelesuan perekonomian dunia. Namun perlu disadari bahwa loncatan tersebut belum mampu mencapai target pemerintahan Presiden Jokowi untuk bisa masuk 40 besar. Semua negara menyadari kegiatan bisnis merupakan

mesin pertumbuhan ekonomi saat ini, dan semua berusaha memperbaiki iklim bisnis negaranya agar dapat menarik investasi sebanyak-banyaknya. Untuk dapat bersaing dan mencapai target tersebut, pemerintah perlu melakukan langkah-langkah percepatan pembangunan infrastruktur dan terus menerus melakukan reformasi pelayanan publik.

Upaya tersebut bukan sekedar untuk mengejar target peringkat, tetapi harus menjadi prioritas untuk pemeratakan pertumbuhan kegiatan bisnis, mengingat persoalan ketimpangan antarwilayah yang lebar. Pemerintah perlu bekerja lebih keras dalam mengejar ketertinggalan dari negara lain sekaligus menyelesaikan persoalan ketimpangan antarwilayah. Indonesia perlu belajar dari negara tetangga seperti Malaysia, Taiwan, Tiongkok, Thailand, dan Vietnam untuk memperbaiki iklim bisnisnya dengan membentuk komite kebijakan reformasi (*regulatory reform committees*) bagi para pelaku usaha. Sementara, dalam rangka mendukung peningkatan peringkat kemudahan berbisnis Indonesia, DPR harus menjadikan regulasi dan pengawasan atas pelayanan publik menjadi prioritas dalam membenahi peraturan perundangan dan prioritas alokasi anggaran.

Referensi

- “7 Faktor Pemicu Kemudahan Bisnis Indonesia Naik Kelas”, <http://economy.okezone.com/read/2016/10/26/320/1525325/7-faktor-pemicu-kemudahan-bisnis-indonesia-naik-kelas>, diakses tanggal 15 November 2016.
- “Kemudahan Berbisnis Luar Jawa Butuh Perbaikan Serius”, *Kompas*, 15 November 2016, hal. 1.
- “Kontribusi Ekonomi Timpang”, *Kompas*, 17 November 2016, hal.17.
- “Pengelola Ingin Peran Aktif Pemerintah”, *Kompas*, 16 November 2016, hal.1.
- Doing Business Report: Indonesia Mencatat Rekor Jumlah Reformasi Usaha dalam Satu Tahun, <http://www.worldbank.org/in/news/press-release/2016/10/26/indonesia-enacts-record-number-of-business-reforms-in-one-year-says-doing-business-report>, diakses tanggal 14 November 2016.
- World Bank, *Doing Business di Indonesia 2012*, Washington, DC.